



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KEHADIRAN INDONESIA DAN POSISINYA PADA KTT BRICS 2023

**Sita Hidriyah**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[sita.hidriyah@dpr.go.id](mailto:sita.hidriyah@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 telah digelar di Johannesburg, Republik Afrika Selatan pada 22-24 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir menjadi salah satu pembicara dan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai kepala negara. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial harus menjadi perhatian utama, sesuai dengan spirit Bandung di mana perlunya solidaritas dan kerja sama antarnegara berkembang ditingkatkan. Seruan kerja sama yang setara dan inklusif juga disampaikan presiden dikarenakan tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil. Jumlah rakyat miskin dan kelaparan di dunia semakin bertambah, yang disebabkan krisis pangan dan ancaman krisis iklim yang mengintai umat manusia. Presiden juga menambahkan harapan kepada BRICS untuk dapat menjadi bagian terdepan dalam memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil.

Secara tidak langsung, sebelum berbicara mengenai kerja sama, Presiden Jokowi juga menyerukan ajakan kepada negara-negara di dunia untuk menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Hal ini menjadi menarik, dikarenakan Rusia sebagai anggota BRICS sedang berperang melawan Ukraina, serta konflik antara China dan India terkait masalah perbatasan kedua negara anggota BRICS. Hal tersebut seolah menjadi sebuah sinyal, bahwa Indonesia mengajukan syarat-syarat untuk penyelesaian peperangan dan konflik sebelum menyatakan ketertarikan dan seruan menjadi anggota BRICS, serta penanganan krisis pangan dan isu perubahan iklim.

Meski belum bergabung dengan BRICS, Indonesia menyadari betapa pentingnya BRICS sebagai mitra diplomasi, terutama dalam hal ekonomi. Dalam perekonomian tentunya tidak lepas dari kepentingan bilateral Indonesia dan kepentingan regional sebagai Ketua ASEAN 2023. Bagi negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara, BRICS dapat membantu pertukaran teknologi, pengetahuan, dan perdagangan yang saling menguntungkan satu sama lain. Kapasitas Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 pada KTT BRICS setidaknya memberi keuntungan akan manfaat ekonomi dan investasi, memperkuat peran diplomasi Indonesia, merespons dinamika global, dan memperluas pengaruh dalam memajukan kepentingan nasional.

Jika Indonesia belum memberikan pernyataan tentang keanggotaan, pemerintah perlu menegaskan sikapnya. Apapun keputusan pemerintah yang diambil harus memiliki strategi yang jelas dan kuat dalam menghadapi dinamika dan tantangan dari BRICS, serta memastikan bahwa keputusan untuk bergabung atau tidak bergabung nantinya akan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia serta berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia pada khususnya.

Kehadiran Indonesia untuk memanfaatkan KTT BRICS sebagai sarana memperluas pengaruh dan kepentingan nasionalnya adalah langkah berani dan logis. Namun, penggunaan kekuasaan

penggunaan kekuasaan dan pengaruh harus dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati. Untuk itu, Indonesia harus terus membangun kapasitasnya dan memperkuat diplomasi multilateralnya, dengan memastikan bahwa tindakannya sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia.

## Atensi DPR

Indonesia masih akan mengkaji dan mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Pertimbangan ini justru dikarenakan hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS sudah terjalin sangat baik. Hadirnya Indonesia di KTT BRICS lebih dilakukan sebagai langkah diplomasi strategis yang membawa dampak positif bagi Indonesia dan perubahan akibat peliknya kondisi global saat ini. Komisi I DPR melalui fungsi pengawasan perlu mengingatkan pemerintah, untuk mencermati dinamika hubungan dalam lingkup BRICS, seperti China dan India yang masih memperluas pengaruhnya masing-masing.

Komisi I DPR juga perlu terus mendorong dan memberi dukungan kepada pemerintah dalam setiap inisiatifnya untuk menyatakan posisinya pada suatu forum internasional, termasuk pertimbangan Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS. Sementara itu, DPR melalui peran diplomasi parlemen juga perlu menegaskan dan memanfaatkan berbagai forum antarpemerintah untuk dapat memberikan pandangan sekaligus solusi akan permasalahan geopolitik yang tengah terjadi, dan merumuskan strategi komprehensif yang menjamin kepentingan bersama masyarakat internasional, termasuk BRICS.

## Sumber

kompas.com, 24 Agustus 2023;  
republika.co.id, 25 Agustus 2023;  
setkab.go.id, 24 Agustus 2023;  
theconversation.com, 22 Juli 2023;  
voaindonesia.com, 24 Agustus 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023